

**DOKUMEN RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat merampungkan perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan berdasarkan peraturan tersebut, Dokumen ini disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun semoga bermanfaat bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, 2022

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Indragiri Hilir



WIZARMI, MH

Pembina Tk.I

NIP. 19691125 199003 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN LALU	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLHK TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLHK	9
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	22
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	23
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	31
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ...	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	45
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	45
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	46
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
BAB V PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja RKPD yang dilanjutkan dengan Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja-PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Instansi yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup. Adapun fungsinya adalah, sebagai berikut :

- a) Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Kebersihan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Bidang Pemantauan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- b) Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Kebersihan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Bidang Pemantauan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Kebersihan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Bidang Pemantauan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- d) Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Kebersihan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Bidang Pemantauan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
- m. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
- n. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- o. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan terukur.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan. Rencana kerja ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum di tetapkan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk periode satu tahun kedepan yang diambil dari Rencana strategis yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu juga tujuan ini merupakan upaya dalam pencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022. Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah :

- Menjabarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Menyelenggarakan tugas-tugas dibidang Lingkungan Hidup Daerah.
- Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah.
- Melaksanakan pengendalian kerusakan, pemulihan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
- Melaksanakan fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Penataan dan Penataan Lingkungan.
- Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan
- Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2022.

Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir sepenuhnya mendukung Visi Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan peran strategisnya dalam upaya menyelenggarakan tugas Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai wadah bagi pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya dukungan sumber daya manusia yang cukup memadai yang bertugas sebagai pengawas kebijakan tentang Lingkungan Hidup disertai kondisi daerah yang cukup kondusif, Insya Allah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dapat mewujudkan visinya yang sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Renja-PD dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLHK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

- Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SMP dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampiran table T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota (bila sudah dilakukan)

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
3. Lampiran tabel T-C.32



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidan pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu Dan Capaian Renstra DLHK

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2023. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2021 pada tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan s/d Tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 8/7*100)	(10)	(11 = 6 + 8 + 10)	(12 = 11/5*100)
2.011	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.011.01	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Nilai						22	22	
2.011.01.02.01	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen			100	100	100.00	100	200	
2.011.01.02.01.1	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen								



2.011.01.02.01.06	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen			11	11	100.00	11	22
2.011.01.02.02	1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Orang			40	40	100.00	100	140
2.011.01.02.02.01	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun/Orang			1	1	100.00	40	41
2.011.01.02.03	1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Orang			13	13	100.00	100	113
2.011.01.02.03.02	1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Orang			13	13	100.00	13	26
2.011.01.02.06	1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Persen			5	5	100.00	100	105
2.011.01.02.06.01	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis			5	5	100.00	5	10
2.011.01.02.06.02	1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis			32	32	100.00	9	41
2.011.01.02.06.04	1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis			4	4	100.00	4	8
2.011.01.02.06.05	1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis			3	3	100.00	6	9
2.011.01.02.06.06	1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Eksemplar			7	7	100.00	7	14



2.011.01.02.06.09	1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali			95	81	85.26	118	199	
2.011.01.02.08	1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen			100	100	100.00	100	200	
2.011.01.02.08.01	1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen			100	100	100.00	100	200	
2.011.01.02.08.02	1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening			2	2	100.00	2	4	
2.011.01.02.08.04	1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang			27	27	100.00	27	54	
2.011.01.02.09	1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen			100	100	100.00	100	200	
2.011.01.02.09.01	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit			6	6	100.00	6	12	
2.011.01.02.09.02	1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			39	39	100.00	39	78	
2.011.01.02.09.06	1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			28	28	100.00	28	56	
	1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									
2.011.02	2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen			2	2	100.00	2	4	



2.011.02.02.01	2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen			100	50	50.00	100	150
2.011.02.02.01.01	2.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen			2	1	50.00	2	3
2.011.03	3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Indeks			57.67	57.67	100.00	60.32	117.99
2.011.03.02.01	3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Titik Lokasi Kualitas Udara dan Air Permukaan	Lokasi			8	8	100.00	9	17
2.011.03.02.01.01	3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Sungai			3	3	100.00	3	6
2.011.03.02.01.02	3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kali			1	1	100.00	2	3
	3.1.3	Pengelolaan Laboraturium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan								
2.011.03.02.03	3.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Ha			5	5	100.00	5	10



2.011.03.02.03.01	3.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Lokasi			2	2	100.00	8	10
2.011.03.02.03.04	3.2.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Titik			0	0	0.00	20	20
2.011.04	4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Persen			55	0	0.00	65	65
2.011.04.02.01	4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH yang ditangani	Persen			0	0	0.00	60	60
2.011.04.02.01.04	4.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Ligkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi			0	0	0.00	4	4
2.011.05	5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Ton			3850	2887.5	75.00	3670	6557.5
2.011.05.02.02	5.1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persen			50	37.5	75.00	60	97.5
2.011.05.02.02.02	5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemeritah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenanan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Fasyankes			40	30	75.00	40	70



2.011.06	6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen			100	58.33	58.33	100	158.33
2.011.06.02.01	6.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang taat aturan lingkungan secara administrasi maupun teknis	Persen			80	46.67	58.34	90	136.67
2.011.06.02.01.01	6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rekomendasi			30	5	16.67	30	35
2.011.06.02.01.03	6.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha			17	17	100.00	17	34
2.011.08	7.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang berkompeten	Persen			80	80	100.00	-	-
2.011.08.02.01	7.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen			100	100	100.00	-	-
2.011.08.02.01.02	7.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan yang di Tindak Lanjuti	Verifikasi			7	7	100.00	-	-
2.011.09	8.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Kali			1	1	100.00	1	2
2.011.09.02.01	8.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerima Penghargaan Peduli Lingkungan	Persen			100	100	100.00	100	200



	8.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Sekolah			6	6	100.00	6	12	
2.011.10	9.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen						100	100	
2.011.10.2.01	9.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Persen						100	100	
2.011.10.2.01.01	9.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kali						7	7	
2.011.011	10.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani	Persen			100	66.67	66.67	100	166.67	
2.011.011.02.01	10.1	Pengelolaan Sampah	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang terpelihara dan berfungsi baik	Persen			90	60	66.67	90	150	
2.011.011.02.01.03	10.1.1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Orang			425	425	100.00	425	850	
2.011.011.02.01.04	10.1.2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kali			1	1	100.00	2	3	



2.011.011.02.01.07	9.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jenis			30	30	100.00	30	60	
--------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--	----	----	--------	----	----	--

Berdasarkan evaluasi yang terdapat dalam tabel 2.1 program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun anggaran 2022 masih berjalan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.226.657.403,-

Dalam waktu berjalan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan belum mengalami kendala yang berarti, seiring dengan meredanya masa pandemi *Covid-19*.

Untuk hasil capaian kinerja tahun anggaran 2021 dengan pagu dana sebesar Rp. 15.388.793.454,- bersisa sebesar Rp. 1.409.929.965,- dengan capaian fisik 94% dan keuangan 90.84% dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:
 - a. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH



2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 2) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - 1) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan



- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Program Pengelolaan Persampahan
 - Pengelolaan Sampah
 - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada tahun anggaran 2021 tidak terdapat Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja.



4. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuinya target kinerja yaitu:
 - a. Adanya kesalahan Penentuan Target Kinerja
 - b. Adanya Rasionalisasi Anggaran
 - c. Adanya Perubahan Aturan tentang kewenangan penerbitan Izin Lingkungan sesuai UU Cipta Karya 2020
 - d. PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e. PP 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD antara lain:
 - a. Kegiatan sosialisasi tidak bisa berjalan dikarenakan pandemi *COVID-19*
 - b. Adanya program/kegiatan tahun 2021 yang tidak mencapai target yang direncanakan karena adanya Rasionalisasi anggaran.
 - c. Adanya Perubahan Aturan tentang Izin Lingkungan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:
 - a. Membuat Perencanaan kerja
 - b. Mempercepat pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu-isu strategis di bidang Lingkungan Hidup
 - c. Mempercepat proses pengajuan keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
 - d. Mengoptimalkan peran kontrol internal agar lebih reaktif dan proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melaksanakan fungsi penunjang daerah dibidang Lingkungan Hidup. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir serta Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2019-2023. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK	Nilai AKIP DLHK	B (66.00)	B (70.95)	107.5%
2.	Menjamin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61.85	64.79	104.7%

Dari tabel diatas dengan dua sasaran steategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan persentase capaian Kinerja pada tahun 2021 tergolong sangat memuaskan. Hal ini karena capaian kinerja yang diperoleh melebihi target sebesar 107,5% untuk Nilai Akip Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan 104,7% untuk hasil capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Untuk perhitungan dalam penentuan nilai IKLH mengalami perubahan formulasi dari yang sebelumnya dengan rumus $(IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ menjadi $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ berdasarkan surat nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 dengan perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 telah membuat aplikasi pemantauan IKLH Provinsi/Kabupaten/Kota dengan situs <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>. Melalui web ini, penanggungjawab IKLH Provinsi/Kabupaten/Kota akan menginput hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dan di akhir tahun akan di ekspos nilai IKLH sesuai metode perhitungan yang telah ditetapkan.

Adapun target kinerja untuk nilai IKLH pada tahun 2021 diambil berdasarkan perhitungan dengan menggunakan formulasi yang terdahulu. Dari perubahan formulasi ini maka terjadi selisih antara nilai rumus lama dengan nilai rumus baru yaitu 64,79 di klasifikasikan sedang (50-69,9), sedangkan dengan perhitungan rumus lama diperoleh hasil 60,02 di klasifikasikan sedang (50-69,9). Dari hasil dengan formulasi lama maka capaian kinerja IKLH sebesar 97,04%. Diketahui juga bahwa nilai setiap indikator dalam IKLH yaitu IKA, IKU, IKL/ITH tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. IKA (Indeks Kualiatas Air) target 57,62 terealisasi 50,00
2. IKU (Indeks Kualitas Udara) target 92,09 terealisasi 88,63
3. IKL/ITH (Indeks Kualitas Lahan/Indeks Tutupan Lahan) target 47,32 terealisasi 46,11

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun* 2022	Tahun** 2023	Tahun*** 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				((7)				(8)
1	Nilai evaluasi RB Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	Nilai	-	✓	14.00	14.00	20.00	20.00	14.01	14.01	20.00	21.00	Sesuai Target
2	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Inhil	Predikat	-	✓	B (66.00)	B (71.00)	BB (72.00)	BB (72.00)	B (70.95)	B (71.00)	BB (72.00)	BB (73.00)	Melebihi Target
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	-	✓	61.85	62.42	62.99	62.99	64.79	62.42	62.99	63.00	Sesuai Target
4	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen	-	✓	1	-	-	-	1	-	-	-	Sesuai Target
5	RPPEG Kabupaten/Kota	Dokumen	-	✓		-	1	1	-	-	1	-	Sesuai Target
6	DDDTLH Kabupaten/Kota	Dokumen	-	✓		-	-	-		-	-	-	-
7	DIKPLHD Kabupaten/Kota	Dokumen	-	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	Sesuai Target
8	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen	-	✓	1	-	-	-	1	-	-	-	Sesuai Target
9	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	-	✓	57.62	60.32	63.02	63.02	50.00	60.32	63.02	63.03	Dibawah Target



10	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	-	✓	92.09	92.29	92.50	92.50	88.63	92.29	92.50	92.51	Dibawah Target
11	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	-	✓	47.32	48.32	49.32	49.32	46.11	48.32	49.32	49.33	Dibawah Target
12	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)												
13	Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani	Persen	-	✓	74.00	17.04	16.82	16.82	17.22	17.04	16.82	16.82	Dibawah Target
14	Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang taat pengelolaan Lingkungan	Kegiatan Usaha	-	✓	9	20	20	20	9	20	20	20	Sesuai Target

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berusaha mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir dengan fokus kepada tujuan pelayanan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun semua itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan target indikator capaian hingga akhir tahun. Isu- isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan antara lain:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

a. Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pencemaran Air, Udara di Kabupaten Indragiri Hilir dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Di tambah lagi Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan penduduk di setiap tahunnya dan pembangunan yang terus dilakukan. Kita ketahui bersama bahwa air dan udara merupakan bagian penting dalam siklus kehidupan manusia. Pencemaran air, udara dan tanah disebabkan oleh berbagai hal antara lain:

- 1) Sampah dengan bertambahnya penduduk yang ada di kabupaten Indragiri Hilir kemungkinan besar pula produksi sampah akan meningkat
- 2) Pembuangan limbah terutama limbah cair yang mengalir ke sungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, nutrient, dan padatan tersuspensi
- 3) Meningkatnya aktivitas manusia berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang makin tinggi. Semakin banyak kendaraan bermotor, aktivitas industry, aktivitas peternakan dan penimbunan sampah yang mencemarkan lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi, apalagi ditambah dengan tingginya alih fungsi lahan.

b. Persampahan

Saat ini masalah sampah adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan, penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Begitu juga dengan perilaku masyarakat yang masih buruk dalam pemilahan sampah dari sumbernya yaitu pemilahan sampah organik, non organik, dan plastik dan limbah berbahaya lainnya

c. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup belum optimal, dalam melaksanakan usaha dan kegiatannya masih banyak yang tidak berwawasan lingkungan dan menyampaikan laporannya, masyarakat yang punya kebiasaan membakar sampah, menebang pohon tanpa izin instansi berwenang

d. Kondisi Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami degradasi yang terus meningkat akibat kegiatan alih fungsi lahan, penebangan liar, membuka lahan dengan cara pembakaran, dan aktivitas penduduk lainnya di dalam dan diluar kawasan hutan dan lahan

2. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi

1. Belum memiliki laboratorium lingkungan dan perlengkapannya guna memberikan hasil sampel yang cepat untuk disampaikan dalam waktu dan tempat tertentu
2. Belum adanya pejabat Fungsional PPLHD DAN PPNS Lingkungan dalam upaya melakukan pemantauan dan pengawasan serta pembinaan pengelolaan lingkungan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
4. Masih tingginya pencemaran lingkungan hidup
5. Persentase penanganan sampah masih belum optimal, sampai saat ini penanganan sampah baru terlaksana di 2 Kecamatan dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir
6. Masih rendahnya pola pengelolaan sampah yang berkonsep wawasan lingkungan
7. Tingginya alih fungsi hutan dan lahan

8. Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) sesuai standar (*Sanitary landfill/controll landfill*).
9. Penurunan Kualitas Air Sungai sebagai Air Baku
10. Kurangnya partisipasi dan kesadaran sekolah dalam penerapan Gerakan Perilaku Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)

3. Dampak Terhadap Pencapaian Program Nasional Secara Nasional

Dampak terhadap Pencapaian Program secara Nasional dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum
2. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Menerapkan metode evaluasi pelaksanaan program kegiatan
4. Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan
5. Koordinasi dan kemitraan yang intensif
6. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai
7. Menerapkan sistem informasi lingkungan untuk memudahkan evaluasi
8. Menerapkan teknologi ramah lingkungan
9. Peningkatan pengendalian Kerusakan Kawasan-kawasan Pesisir
10. Peningkatan penyelenggaraan sosialisasi
11. Penyusunan produk hukum di bidang lingkungan hidup
12. Kebijakan Pengelolaan Persampahan dalam Penyehatan Lingkungan

4. Tantangan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

a. Tantangan

- Belum maksimalnya penegakkan hukum
- Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang terus meningkat disertai meningkatnya pembangunan dari tahun ketahun untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan mengeksploitasi sumber daya alam;
- Tingkat kesadaran dan partisipasi stakeholder dan kreatifitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan;

- Masih belum konsistennya penerapan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan;
- Belum dapat dikelolanya dengan baik limbah domestik, limbah B3, sebagai hasil sisa proses produksi kegiatan industri, limbah medis, serta belum berperannya teknologi dalam pengolahan sampah domestik baik sampah rumah tangga, pasar dan industri;
- Masih rendahnya pemahaman perusahaan terhadap regulasi pengelolaan limbah B3;
- Tingginya laju degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis, menurunnya kuantitas dan kualitas air (baik air tanah maupun air permukaan);
- Menurunnya kualitas lingkungan hidup baik lingkungan hidup darat, laut maupun udara termasuk juga masih lemahnya penataan kawasan perkotaan dan kawasan pesisir;
- Rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi secara terus menerus salah satunya bencana api/asap beberapa waktu lalu dan kurangnya partisipasi masyarakat melakukan pengawasan dalam pencegahan pencemaran sumber-sumber air yang menyebabkan rendahnya kualitas air pada sumber air.
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sehingga dalam pelaksanaan musrenbang tidak ada usulan kegiatan yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
- Tidak tersedianya anggaran untuk menindak lanjuti isu-isu lingkungan yang terjadi/terdata dari pihak kecamatan karena di anggap tidak berbahaya

b. Peluang

- Apresiasi dan Harapan yang tinggi dari pimpinan daerah dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tentang peran maksimal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembangunan daerah yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi;
- Kebijakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan terus berkembang dan menjadi isu global yang harus dilaksanakan oleh seluruh sektor;

- Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan terciptanya lingkungan yang bersih, berkualitas dan sehat;
- Meningkatnya keikutsertaan dan partisipasi dunia usaha/industri yang memiliki potensi dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup;
- Semakin berkembangnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok masyarakat yang memiliki potensi melakukan partisipasi sosial dan kontrol dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
- Terus meningkatnya jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)
- Tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan secara kontiyu dalam penyampaian informasi secara langsung mengenai program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir maupun melakukan inventarisasi isu-isu lingkungan yang terjadi di Kecamatan yang selama ini tidak terpantau.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu yang telah dijabarkan ada beberapa rekomendasi dan catatan untuk tindaklanjut dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk tahun yang direncanakan sebagai berikut:

- a. Untuk permasalahan mengenai belum tersedianya laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maka akan di usulkan kegiatan yang dapat mendukung terselesaikannya masalah ini yang termuat didalam program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Untuk rekomendasi atas masalah persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah berusaha untuk mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana persampahan seperti alat pengangkut sampah berupa kendaraan roda 3(tiga) dan truk pengangkut sampah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada OPD dalam menyusun rancangan Renja-PD dalam kurun 1 (satu) tahun. Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD dengan mengacu kepada prioritas program/ kegiatan dan hasil pembahasan awal renja berdasarkan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2023. Dalam Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Di samping itu, rencana kinerja ini juga memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui rancangan kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17,447,125,918	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17,447,125,918	
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLHK KAB. INHIL	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	6,849,636,549	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLHK KAB. INHIL	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	6,849,636,549	
	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	118,459,950	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	118,459,950	
	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	
	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	11	98,459,950	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	11	98,459,950	



		Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD						Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD				
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	4,917,440,826	1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	4,917,440,826	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39	4,917,440,826	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39	4,917,440,826	
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	230,042,400	1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen	100	230,042,400	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	230,042,400	1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	230,042,400	
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Persen	100	722,176,773	1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Persen	100	722,176,773	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15,000,000	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15,000,000	



	1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	123,000,000		1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	123,000,000	
	1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	80,000,000		1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	80,000,000	
	1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	101,710,773		1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	101,710,773	
	1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	11,160,000		1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	11,160,000	
	1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	391,306,000		1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	391,306,000	
	1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	523,516,600		1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	523,516,600	
	1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	7,000,000		1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	7,000,000	



1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	103,880,000	1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	103,880,000
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	412,636,600	1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	412,636,600
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	338,000,000	1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	338,000,000
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	50,000,000	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	50,000,000
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	39	28,000,000	1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	39	28,000,000



	1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLHK KAB. INHIL	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlihara	Unit	28	10,000,000	atau Lapangan	1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLHK KAB. INHIL	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlihara	Unit	28	10,000,000	
	1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLHK KAB. INHIL	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	250,000,000		1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLHK KAB. INHIL	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	250,000,000	
2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHK KAB. INHIL	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	2	298,608,000		2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHK KAB. INHIL	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	2	298,608,000
	2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	DLHK KAB. INHIL	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	298,608,000		2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	DLHK KAB. INHIL	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	298,608,000	
	2.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	DLHK KAB. INHIL	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	298,608,000		2.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	DLHK KAB. INHIL	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	298,608,000	
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHK KAB. INHIL	Indeks Kualitas Air	Indeks	63.02	1,003,045,588		3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHK KAB. INHIL	Indeks Kualitas Air	Indeks	63.02	1,003,045,588
	3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLHK KAB. INHIL	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92.50					DLHK KAB. INHIL	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92.50		
	3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLHK KAB. INHIL	Persentase Pemantauan Titik Lokasi Kualitas Udara dan Air Permukaan	Persen	100	833,045,588		3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLHK KAB. INHIL	Persentase Pemantauan Titik Lokasi Kualitas Udara dan Air Permukaan	Persen	100	833,045,588	



3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dokumen	1	357,866,425	3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dokumen	1	357,866,425
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	77,315,750	3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	77,315,750
3.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Dokumen	1	397,863,413	3.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Dokumen	1	397,863,413
3.2	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	170,000,000	3.2	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	170,000,000



	3.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	170,000,000		3.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	170,000,000		
4.		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLHK KAB. INHIL	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Persen	35	1,250,258,200		4.		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLHK KAB. INHIL	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Persen	35	1,250,258,200	
	4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Luas RTH yang ditangani	Persen	35	1,250,258,200		4.1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Luas RTH yang ditangani	Persen	35	1,250,258,200	
	4.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Ligkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	22	1,250,258,200		4.1.1		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Ligkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	22	1,250,258,200	
5.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLHK KAB. INHIL	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	294,767,250		5.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLHK KAB. INHIL	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	294,767,250	
	5.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang taat aturan lingkungan secara administrasi maupun teknis	Persen	100	294,767,250		5.1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang taat aturan lingkungan secara administrasi maupun teknis	Persen	100	294,767,250	



	5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	4	142,889,250		5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	4	142,889,250		
	5.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	10	151,878,000		5.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	10	151,878,000		
6.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DLHK KAB. INHIL	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	100	169,840,500	6.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DLHK KAB. INHIL	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	100	169,840,500
	6.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerima Penghargaan Peduli Lingkungan	Persen	100	169,840,500		6.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerima Penghargaan Peduli Lingkungan	Persen	100	169,840,500		
	6.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka	Entitas	6	169,840,500		6.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka	Entitas	6	169,840,500		



	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		PPLH				Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		PPLH			
7.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK KAB. INHIL	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	100	69,990,000	7. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK KAB. INHIL	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	100	69,990,000
7.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Persen	100	69,990,000	7.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Persen	100	69,990,000
7.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	Dokumen	4	69,990,000	7.1.1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	Dokumen	4	69,990,000
8.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLHK KAB. INHIL	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani	Persen	90	7,510,979,831	8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLHK KAB. INHIL	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani	Persen	90	7,510,979,831
8.1	Pengelolaan Sampah		Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang terpelihara dan berfungsi baik	Persen	90	7,510,979,831	8.1 Pengelolaan Sampah		Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang terpelihara dan berfungsi baik	Persen	90	7,510,979,831



8.1.1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Ton	19,093	5,096,701,850	8.1.1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Ton	19,093	5,096,701,850
8.1.2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	1	130,605,900	8.1.2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	1	130,605,900
8.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	44	2,283,672,081	8.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	44	2,283,672,081

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, selain mengacu pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir juga membuka saran dan masukan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diselenggarakan secara berjenjang.

Sebagai dinas yang mempunyai tugas dan kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, maka kebijakan yang diambil dalam menentukan usulan program dan kegiatan selalu diseleraskan dengan kebijakan umum kepala daerah dan pemerintah pusat.

Terkait dengan masukan dari berbagai elemen tentang kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang tahun 2022 secara daring, tidak semua rencana usulan dapat disertakan, karena keterbatasan anggaran, target, dan prioritas permasalahan yang harus di tangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Berikut beberapa usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:



Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Pengadaan tempat sampah	DLHK KAB. INHIL Gaung Anak Serka Pekan Kamis Tembilahan Hulu Tembilahan Kota Pekan Arba Tembilahan Mekar Sari Reteh Enok Concong Tengah Sungai Piring Batang Tuaka Benteng Sungai Batang	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Persen Unit	90 44	Adanya SK dari setiap Kelurahan/Desa mengenai Tempat-Tempat yang menjadi Titik peletakan Tempat Sampah (Tong Sampah) dan lokasi TPST (Tempat Pembungan Sampah Sementara) pada Setiap Kelurahan/ Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir



	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan tempat pembuangan akhir sampah- Bantuan Motor Viar Sampah	<p>Benteng Utara Sungai Batang</p> <p>Tempuling Sungai Salak</p> <p>Pulau Kijang Reteh</p> <p>Pasengerahan Sungai Batang</p> <p>Limau Manis Kemuning</p>			<p>Untuk Pengadaan Lahan TPA di Kecamatan, Kecamatan Wajib menyediakan lahan Aset Milik Daerah</p> <p>Dianggarkan dari Anggaran Kecamatan atau Desa dan tercatat di dalam aset Desa, OPD DLHK disarankan dikelola oleh desa atau kelurahan</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secara umum usulan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan terhadap pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2022 diarahkan pada penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan berupa pengadaan Tempat Sampah, Pembangunan TPA di Kecamatan dan Alat angkut Sampah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pokok-pokok Kebijakan Lingkungan Hidup Nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir meliputi arah dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sedangkan pokok-pokok kebijakan energi nasional yang sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu :

1. Arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
 - a. Perlu peningkatan kualitas informasi tentang konsep dan rujukan Pembangunan yang berkelanjutan.
 - b. Perlu diperbaiki sistem birokrasi dan informasi serta kemitraandilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, disamping koordinasi antar institusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan tentang pembangunan yang berkelanjutan.
2. Arah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan
 - a. Peningkatan pemahaman tentang konsep berwawasan lingkungan
 - b. Perlunya sosialisasi kepada pelaku usaha perkebunan, kehutanan dan industri tentang pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Adapun kebijakan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan penataan dan penataan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Peningkatan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Peningkatan sarana/prasarana dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. Peningkatan kerjasama antar lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah domestik;
5. Mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup;

7. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan serta pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah dan antar sektor;
8. Meningkatkan kualitas data dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
			Realisasi			Target	
			2019	2020	2021*	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	60.05	65.02	69.00	72.00	79.00
		Nilai AKIP	CC	B	B	B	BB
1.1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Inhil	Nilai evaluasi RB Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Inhil atas komponen pengungkit	-	13.27	14.01	14.00	20.00
		Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Inhil	C (47.80)	B (62.28)	B (70.95)	B (71.00)	BB (72.00)
2.	Menjamin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53.04	57.79	64.79	62.42	62.99
2.1	Tertatanya Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen RPPLH	-	-
		RPPEG Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1 Dokumen RPPEG

		DDDTLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen DDDTLH	-	-	-	-
		DIKPLHD Kabupaten/Kota	1 Dokumen SLHD	1 Dokumen DIKPLHD	1 Dokumen DIKPLHD	1 Dokumen DIKPLHD	1 Dokumen DIKPLHD
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	2.2 Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	52.22	32.86	50.00	60.32	63.02
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91.67	92.15	88.63	92.29	92.50
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)					
		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	45,00	50.72	46.11	48.32	49.32
		Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani	70%	13.92%	17.22%	17.04%	16.82%
	2.3 Penaatan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang taat pengelolaan Lingkungan	17 Kegiatan Usaha	9 Kegiatan Usaha	9 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha

3.3 Program Dan Kegiatan Rencana Kerja TA. 2022

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyusun program sebagai arah dan gerak dalam melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan kondisi dan sumber daya, serta konsisten mewujudkannya dalam kegiatan yang berkesinambungan dan bersinergis dengan kegiatan Kabupaten/Kota dan juga Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 – 2023.

Kegiatan merupakan gerak langkah yang akan dilaksanakan guna mencapai berbagai program yang telah ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan yang akan dilaksanakan harus terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga segala program yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan sempurna tanpa hambatan.

a. Faktor yang menjadi Pertimbangan Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah sebagai berikut:

- Pencapaian sasaran Misi-1 Kabupaten Indragiri Hilir Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkepatutan hukum. Untuk mencapai target tersebut maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung misi tersebut;
- Pencapaian sasaran Misi-3 Kabupaten Indragiri Hilir Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat. Untuk mencapai target tersebut maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung misi tersebut;
- Mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

b. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 berjumlah 8 (Delapan) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan, dan 29 (Dua Puluh Sembiliah) Sub Kegiatan untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 6,849,636,549,- dengan kegiatan dan sub kegiatannya yaitu:
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 118,459,950,-
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20,000,000,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 98,459,950,-
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4,917,440,826,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4,917,440,826,-

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 230,042,400,-
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 230,042,400,-
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 722,176,773,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.15,000,000,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.123,000,000,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80,000,000,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 101,710,773,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu indikatif sebesar Rp.11,160,000,-
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp.391,306,000,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.523,516,600,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu indikatif sebesar Rp.7.000.000,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 103,880,000,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 412,636,600,-
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.338,000,000,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.50,000,000,-

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu indikatif sebesar Rp.28,000,000,-
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp.92,752,000,-
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10,000,000,-
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250,000,000,-
- 2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan pagu indikatif sebesar Rp. 298,608,000,-
- Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 298,608,000,-
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 298,608,000,-
- 3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1,003,045,588,-
- Kegiatan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 833,045,588,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap, Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan pagu indikatif sebesar Rp. 357,866,425,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kasa, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan pagu indikatif sebesar Rp. 77,315,750,-
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Laboraturium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 397,863,413,-
 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 170,000,000,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 170,000,000,-

- 4) Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1,250,258,200
 - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1,250,258,200,-
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1,250,258,200,-
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 294,767,250,-
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 294,767,250,-
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan pagu indikatif sebesar Rp. 142,889,250,-
 - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 151,878,000,-
- 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan pagu indikatif sebesar Rp. 169,840,500,-
 - Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 169,840,500,-
 - Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pagu indikatif sebesar Rp. 169,840,500,-
- 7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan pagu indikatif sebesar Rp. 69,990,000,-
 - Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 69,990,000,-
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 69,990,000,-

8) Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 69,990,000,-
 - Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5,096,701,850,-
 - Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 130,605,900,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2,283,672,081,-

- c. Rumusan Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD
Dalam perumusan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir

- d. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat di lihat pada tabel 3.3 berikut ini:



Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.011	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17,447,125,918				22,789,370,134
2.011.01	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	DLHK KAB. INHIL	100	6,849,636,549			100	7,699,200,000
2.011.01.02.01	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		100	118,459,950			100	150,000,000
2.011.01.02.01.01	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	25,000,000
2.011.01.02.01.6	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		11	98,459,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11	125,000,000
2.011.01.02.02	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		100	4,917,440,826			100	5,500,000,000



2.011.01.02.02.1	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		39	4,917,440,826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		39	5,500,000,000
2.011.01.02.03	1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		100	230,042,400			100	229,200,000
2.011.01.02.03.2	1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	230,042,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	229,200,000
2.011.01.02.06	1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Persen		100	722,176,773			100	830,000,000
2.011.01.02.06.01	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	20,000,000
2.011.01.02.06.02	1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3	123,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	200,000,000
2.011.01.02.06.04	1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	60,000,000
2.011.01.02.06.05	1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2	101,710,773	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	35,000,000
2.011.01.02.06.06	1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1	11,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	15,000,000
2.011.01.02.06.09	1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		3	391,306,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	500,000,000
2.011.01.02.08	1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		100	523,516,600			100	545,000,000
2.011.01.02.08.1	1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	15,000,000



2.011.01.02.08.2	1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		2	103,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	110,000,000
2.011.01.02.08.4	1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	412,636,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	420,000,000
2.011.01.02.09	1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		100	338,000,000			100	445,000,000
2.011.01.02.09.1	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		6	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	70,000,000
2.011.01.02.09.2	1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		39	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		39	60,000,000
2.011.01.02.09.6	1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlihara	Unit		28	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28	15,000,000
2.011.01.02.09.9	1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	300,000,000
2.011.02	2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	DLHK KAB. INHIL	2	298,608,000			2	328,608,000
2.011.02.02.01	2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		100	298,608,000			100	328,608,000
2.011.02.02.01.1	2.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupate/Kota yang Disusun	Dokumen		1	298,608,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	328,608,000
2.011.03	3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Indeks	DLHK KAB. INHIL	63.02 Indeks 92.50 Indeks	1,003,045,588			63.02 Indeks 92.50 Indeks	2,836,562,134



2.011.03.02.01	3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Titik Lokasi Kualitas Udara dan Air Permukaan	Persen		100	833,045,588			100	2,636,562,134
2.011.03.02.01.1	3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dokumen		1	357,866,425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	392,866,425
2.011.03.02.01.2	3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen		1	77,315,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	100,000,000
2.011.03.02.01.3	3.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Dokumen		1	397,863,413	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	2,143,695,709
2.011.03.02.03	3.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen		1	170,000,000			1	200,000,000
2.011.03.02.03.4	3.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen		1	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	200,000,000
2.011.04	4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Persen	DLHK KAB. INHIL	35	1,250,258,200			35	1,500,000,000
2.011.04.02.01.	4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH yang ditangani	Persen		35	1,250,258,200			35	1,500,000,000
2.011.04.02.01.4	4.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Ligkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha		22	1,250,258,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22	1,500,000,000
2.011.06	5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	DLHK KAB. INHIL	100	294,767,250			100	370,000,000



2.011.06.02.01	5.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perusahaan yang taat aturan lingkungan secara administrasi maupun teknis	Persen		100	294,767,250			100	370,000,000
2.011.06.02.01.1	5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen		4	142,889,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	170,000,000
2.011.06.02.01.3	5.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan		10	151,878,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	200,000,000
2.011.09	6.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	DLHK KAB. INHIL	100	169,840,500			100	180,000,000
2.011.09.02.01	6.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penerima Penghargaan Peduli Lingkungan	Persen		100	169,840,500			100	180,000,000
2.011.09.02.01.1	6.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		6	169,840,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	180,000,000
2.011.010	7.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	DLHK KAB. INHIL	100	69,990,000			100	75,000,000
2.011.010.02.01	7.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Persen		100	69,990,000			100	75,000,000
2.011.010.02.01.1	7.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	Dokumen		4	69,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	75,000,000
2.011.011	8.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani	Persen	DLHK KAB. INHIL	90	7,510,979,831			90	9,800,000,000
2011.011.02.01	8.1	Pengelolaan Sampah	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang terpelihara dan berfungsi baik	Persen		90	7,510,979,831			90	9,800,000,000



2011.011.02.01.3	8.1.1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	19,093	5,096,701,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19,093	5,200,000,000
2011.011.02.01.4	8.1.2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	1	130,605,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	100,000,000
2011.011.02.01.7	8.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	44	2,283,672,081	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44	4,500,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 4

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17,447,125,918	
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	DLHK KAB. INHIL	100	6,849,636,549	
1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		100	118,459,950	
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		11	98,459,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		100	4,917,440,826	
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		39	4,917,440,826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		100	230,042,400	
1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	230,042,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Persen		100	722,176,773	
1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3	123,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2	101,710,773	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1	11,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		3	391,306,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		100	523,516,600	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		2	103,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	412,636,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		100	338,000,000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		6	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		39	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		28	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	DLHK KAB. INHIL	2	298,608,000	
2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		100	298,608,000	
2.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		1	298,608,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Indeks	DLHK KAB. INHIL	63.02 Indeks 92.50 Indeks 100	1,003,045,588	
3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Titik Lokasi Kualitas Udara dan Air Permukaan	Persen			833,045,588	
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dokumen		1	357,866,425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen		1	77,315,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Dokumen		1	397,863,413	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen		1	170,000,000	
3.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen		1	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Persen	DLHK KAB. INHIL	35	1,250,258,200	
4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH yang ditangani	Persen		35	1,250,258,200	
4.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Ligkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha		22	1,250,258,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	DLHK KAB. INHIL	100	294,767,250	
5.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang taat aturan lingkungan secara administrasi maupun teknis	Persen		100	294,767,250	



5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen		4	142,889,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		10	151,878,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	DLHK KAB. INHIL	100	169,840,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerima Penghargaan Peduli Lingkungan	Persen		100	169,840,500	
6.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		6	169,840,500	
7.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	DLHK KAB. INHIL	100	69,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Persen		100	69,990,000	
7.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Dokumen		4	69,990,000	
8.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani	Persen	DLHK KAB. INHIL	90	7,510,979,831	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8.1	Pengelolaan Sampah	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang terpelihara dan berfungsi baik	Persen		90	7,510,979,831	
8.1.1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton		19,093	5,096,701,850	
8.1.2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok		1	130,605,900	



8.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit		44	2,283,672,081	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
-------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	----	---------------	--------------------------------------

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023.

Rancangan Akhir Renja PD ini telah memuat seluruh aspek yang diharapkan untuk dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh sebab itu pelaksanaan rancangan akhir RENJA-PD membutuhkan kecermatan, kreatifitas dan respon terhadap masalah-masalah Lingkungan Hidup. Dokumen perencanaan ini memiliki sifat yang dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan hasil Musrenbang tahun 2022.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Tembilahan, 2022

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Indragiri Hilir,

D. ZWIZARMI, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19691125 199003 1 002